

Praktik Diskursif
The Theory of Truth Michel Foucault
dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa di Indonesia

Moch. Jalal

Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

Language is not merely reproducing means in order to re-voice ideas, but on top of that, it can construct the idea too. This theory has been applied since the administration of New Order government, a practice that has allowed the government to have a special policy to direct the development of Indonesian language. Therefore, it has not only been functioning as a medium of communication supporting the life of the state, but at the end it has also been functioning as an effective means of instruction in certain discourse with specific purpose appealed by the government.

Keyword: Foucault, language, function, government, idea construction

Kesadaran orang terhadap adanya fungsi multidimensional bahasa, sebenarnya telah mulai ditunjukkan sejak berabad-abad silam. Bahkan sejak zaman Yunani kuno, minat orang terhadap kajian tentang banyaknya fungsi yang dapat dimainkan bahasa tersebut telah menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Pada masa itu para filosof Yunani memandang bahasa antara lain berfungsi sebagai alat untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran, alat mengekspresikan hal-hal yang bersifat artistik, dan sarana untuk persuasi. Cassirer (1987) menggambarkan, dalam pandangan hidup orang Athena abad ke-5, bahasa dipandang menjadi instrumen untuk mencapai tujuan kongkrit dan praktis tertentu. Bahasa bahkan dianggap sebagai senjata ampuh dalam percaturan politik tingkat tinggi. Hal itu menunjukkan jika sejak dahulu orang sudah mulai memandang fungsi bahasa yang bukan hanya sekedar sebagai alat atau sarana komunikasi dan ekspresi diri semata. Bahkan kompleksitas peran bahasa dalam fungsinya sebagai sarana mengkonstruksi kehidupan bermasyarakat dan berpolitik telah disadari sejak lama.

Sejak era linguistik kontemporer, bidang kajian bahasa rupa-rupanya sudah setingkat di atas bidang kajian pada era linguistik tradisional/konvensional. Jika sebelumnya minat kajian bahasa hanya sebatas pada persoalan internal ke-bahasaan, selanjutnya objek kajian bahasa mulai merambah pada aspek-aspek multidimensional, termasuk hubungannya dengan fenomena sosial, budaya, bahkan panggung percaturan politik. Hal itu wajar terjadi, mengingat dalam berbagai aspek kehidupan manusia bermasyarakat, keberadaan bahasa sebagai salah satu instrumen utama, jelas tidak dapat diingkari. Bahasa selalu ikut serta dalam setiap aktifitas kehidupan manusia bermasyarakat, juga sebaliknya tatanan kebahasaan tidak akan pernah lepas dari aspek multidimensional yang menjadi *setting atau background context*. Dalam hal ini bahasa tidak hanya dipandang semata-mata sebagai alat komunikasi atau sebuah sistem kode, serta hanya mengacu pada suatu realitas monolitik tertentu. Bahasa lebih jauh harus dipandang sebagai sebuah aktifitas atau kegiatan sosial. Secara sosial, bahasa terikat, dikonstruksi, dan direkonstruksi oleh kondisi serta berbagai *setting* sosial tertentu, ketimbang muncul sebagai sebuah realitas yang hanya terbentuk oleh hukum alamiah secara universal.

Sebagai representasi dari hubungan-hubungan sosial tertentu, bahasa senantiasa membentuk subjek-subjek, strategi-strategi, dan tema-tema wacana tertentu. Adanya kesadaran akan hal itu, membuat orang yang memiliki akses kekuasaan melalui bahasa, dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkannya. Dalam hal ini tentu saja termasuk

mengkonstruksi simbol-simbol dan wacana bahasa sesuai dengan yang diinginkannya. Sebagai filosof yang telah memahami kondisi ini, Foucault benar-benar percaya akan kemampuan yang dimiliki penguasa dalam mengkonstruksi serta menciptakan subjek-subjek tertentu melalui kekuasaan yang dimilikinya. Realitas mengkonstruksi simbol dan wacana seperti ini nyaris selalu dipraktikkan oleh para penguasa dalam sejarah pengendalian aspek-aspek tertentu kepada pihak yang dikuasainya. Bahkan dalam sejarah panggung politik di Indonesia, sejak era Orde Baru, praktik serupa juga tampak dipraktikkan. Lewat penciptaan simbol dan wacana tertentu, pemerintah Orde Baru ketika itu benar-benar memanfaatkan sarana bahasa Indonesia sebagai media efektif dalam rangka mengendalikan dan mempertahankan kekuasaannya.

Artikel ini bermaksud menguraikan pemikiran Foucault tentang eksplorasi praktik-praktik diskursif serta wujud-wujud kekuasaan dalam membentuk subjek tertentu. Serta menunjukkan bagaimana praktik yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dalam mencipta-kan simbol-simbol dan wacana bahasa Indonesia dalam rangka menjalankan kekuasaan ketika itu. Masalah utama yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah praktik penciptaan simbol dan wacana yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, yang dalam bahasanya Foucault diistilahkan dengan praktik diskursif kekuasaan dalam membentuk subjek?

Pemikiran Michel Foucault

Foucault (1926-1984) merupakan salah satu pemikir terkemuka dalam dunia ilmu sosial dan filsafat. Karya-karya hasil pemikirannya di kemudian hari bahkan sempat menjadi *grand theory* yang mendunia dalam kancan teori sosial. *The Theory of Truth* merupakan salah satu pemikiran cemerlangnya yang mengupas tentang nilai-nilai subjektifitas konstitutif serta eksplorasi praktik-praktik diskursif penguasa dalam membentuk subjek. Karya-karya pemikiran Foucault dapat dipandang sebagai kontribusi luar biasa terhadap teori kebudayaan dalam teori sosial. Karya awalnya mengenai praktik-praktik diskursif merupakan upaya menyusun teori tentang koherensi internal yang tidak memperlakukan kebudayaan sebagai totalitas, melainkan sebagai domain-domain atau formasi spesifik kebudayaan-kebudayaan dengan cirinya yang diskursif. Gagasan mengenai kekuasaan dalam karya Foucault merupakan jawaban atas persoalan bagaimana dan mengapa formasi-formasi diskursif berubah. Pandangan mengenai otonomi kebudayaan dalam kaitannya dengan koherensi internal di dalam formasi-formasi diskursif akhirnya tergusur seiring dengan bergesernya penekanan menuju relasi kekuasaan sebagai sendi terpenting. Hal itu lantas menjadikan pengetahuan sebagai wahana bagi strategi, pergulatan, serta konflik demi kekuasaan. Gagasan Foucault tentang kekuasaan disipliner merupakan representasi dari upaya pem-bacaan teoritis-kekuasaan atas modernitas.

Menurut analisis Beilharz (1991), dalam *The Order of Thing: An Archaeology of the Human Sciences* (1966) karya Foucault, terdapat tiga domain utama, yaitu kehidupan, kinerja, dan bahasa. Pada karyanya yang berjudul *Madness and Civilization* (1961), Foucault sepertinya menganalogkan penderita kegilaan yang harus dirawat oleh dokter di rumah sakit jiwa, merupakan refleksi dari realitas praktik subjektifitas diskursus yang nyata. Penderita penyakit gila dikungkung dan dikendalikan semua aktifitas pemikiran maupun kehidupannya. Seab semua pemikiran maupun aktifitas pasien gila di-anggap sebagai sebuah kesalahan yang harus diluruskan. Adanya kondisi inferioritas bagi si pasien sebagai akibat justifikasi bahwa pemikiran serta perilaku pasien harus dinormalkan, menjadikan semua sistem rumah sakit termasuk aturan sang dokter menjadi sang penguasa. Dengan demikian sang dokter sebagai pihak yang berkuasa dengan luasannya mengkonstruksi pemikiran pasien gila sesuai dengan arah yang dikehendaki. Dalam hal ini yang lebih mendominasi dan berlaku adalah kehendak sang dokter, bukannya keinginan-keinginan mendasar dari si pasien gila. Argumen tersebut yang mendasari alasan bahwa setiap kegilaan tidak bisa bebas dibiarkan, melainkan harus dikungkung di RSJ untuk tujuan meluruskannya.

Analog tersebut jika disejajarkan dengan kondisi praktik diskursif dalam kehidupan sosial antara penguasa yang ingin mengendalikan pihak yang dikuasainya. Pihak berkuasa yang menganggap sebagai yang paling benar dan yang paling berhak mengendalikan keadaan harus selalu mengarahkan dan mengendalik-an semua perilaku, gerak-gerik, pemikir-an, bahkan wacana yang berkembang. Wacana tidak dapat dibiarkan secara bebas berkembang, melainkan harus selalu ada institusi yang berperan untuk mengarahkan bahkan menguasainya. Pada formasi sosial tertentu selalu akan muncul manusia kehendak *man of desire* yang berperan sebagai kunci pada setiap subjektivasi. Wujud penampakkannya *man of desire* ini dapat berupa penguasa negara atas rakyat, dokter atas pasien, serta komponen-komponen lain setiap wujud penguasaan superioritas atas inferioritas pada tatanan sosial tertentu. Manusia kehendaklah yang akhirnya cenderung menentukan berbagai aspek tatanan, sistem nilai, maupun berbagai aspek terkait dengan benar-salah, baik-buruk, jahat-tidak jahat, dan lain-lain.

Berkaitan dengan wacana, Foucault lebih tertarik melihat realitas tersebut sebagai praktik sistematis yang dapat di-bentuk dan dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Acuan dan makna sebuah wacana dalam kehidupan bermasyarakat sangat berpotensi dibentuk oleh si manusia kehendak yang relatif memiliki keleluasaan untuk melakukannya. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia, wacana secara umum tidak pernah netral dan lahir berdasarkan asumsi alamiah. Wacana pada dasarnya sengaja dibentuk dan dikondisi-kan oleh institusi-institusi yang lebih dominan atas aspek-aspek yang dido-minasinya. Menurut Foucault, *discourse is political commodity, a phenomenon of exclusion, limitation, prohibition* (Gordon, 1980:245).

Hegemoni Wacana Bahasa Orde Baru

Lewat teori-teori yang dikemukakannya Foucault menyadarkan dunia bahwa bahasa sebagai wacana tidak pernah netral. Dengan kata-katanya dia menggambarkan, *language as a discourse is never neutral and is always laden with rules, privileging a particular group while excluding other* (Foucault, 1972:216). Kondisi seperti yang digambarkan Foucault tersebut tampaknya nyaris sama dengan wacana yang berkembang dalam bahasa Indonesia ragam pemerintahan Orde Baru ketika mereka berkuasa. Pada era kendali pemerintahan Orde Baru, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat disamakan arti pentingnya dengan program keluarga berencana yang merupakan *main program* mereka. Anton M. Moeliono, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan-an Bahasa, menggambarkan analogi itu. Menurutnya, dalam dua program tersebut campur tangan pemerintah dianggap sebagai sebuah keharusan dan dianggap sebagai langkah yang tepat. Keseriusan campur tangan pemerintah dalam mengendalikan bahasa Indonesia semakin tampak, setelah Presiden Soeharto menuangkan seruan itu dalam amanat resmi kenegaraan. Pertama, membina dan mengembangkan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab nasional. Mengabaikan tanggung jawab ini sama halnya dengan membiarkan bahasa Indonesia terancam menuju kehancuran (Anonim, 1972:30-31). Pernyataan ini dapat diartikan sebagai keharusan untuk tidak boleh membiarkan perkembangan bahasa Indonesia secara alamiah. Sebab jika dibiarkan secara alamiah, di kemudian hari perkembangan bahasa Indonesia justru dianggap akan mengalami kehancuran. Sebagai langkah strategis yang wajib dilakukan adalah harus *membina* dan *mengembangkan* yang tentu saja realisasinya tidak akan pernah steril dari berbagai aspek politisasi.

Kedua, Presiden lebih jauh lagi meng-hubungkan antara penggunaan bahasa yang benar dengan keberhasilan pembangunan. Dinyatakan bahwa: bahasa yang tertib mencerminkan cara berfikir, sikap, dan tin-dakan yang tertib pula. Dan ketertiban inilah kunci utama bagi berhasilnya pembangunan dan pembinaan bangsa (Anonim, 1973:82). Penggu-naan konsep bahasa yang benar serta ba-hasa yang tertib pada implementasinya akan diarahkan pada praktik yang sarat dengan kepentingan politik kekuasaan tertentu. Pertama, konsep benar dan tertib tentu harus

patuh dan tunduk pada hukum aturan berbahasa yang merupakan hasil produksi lembaga pemerintah. Kedua, tercipta sebuah kondisi bahwa yang tidak berbahasa dengan benar dan tertib berarti tidak mau mematuhi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Program pengembangan bahasa Indonesia lebih kongkrit dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun ke II (Repelita II). Sasaran utamanya adalah membina bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional. Tindakan kongkrit -nya dilakukan berupa program-program seperti: pembakuan ejaan, tata bahasa, dan kosakata teknis. Sedangkan penyebarluasannya dilakukan melalui media jaringan radio RRI maupun swasta, televisi TVRI maupun swasta, serta media-media cetak yang ada. Media-media yang ada ini ketika itu benar-benar dikontrol secara ketat ber-kaitan dengan materi-materi siaran yang mereka beritakan. Kesalahan penampilan wacana tertentu dapat berakibat fatal, misalnya tuduhan tindak pidana, penutup -an, pembredelan media bersangkutan.

Program pembinaan bahasa Indonesia seperti yang dilakukan Orde Baru sebenarnya bukanlah hal baru dan semata-mata sebagai misi pengembangan bahasa. Ada sejarah panjang tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan fungsinya sebagai bahasa kebangsaan. Sampai masa pemerintahan Orba paling tidak tercatat sudah 5 (lima) kali diadakan konggres bahasa yaitu, tahun 1928, 1954, 1978, 1984, dan 1988. Setiap konggres menghasilkan kebijakan baru bagi perkembangan bahasa Indonesia (Adiwasono, 1989:78 -115) .

Salah satu perhatian utama dari kebijakan pemerintahan Orba adalah mengadakan pembakuan bahasa Indonesia serta melahirkan seruan penggunaan secara baik dan benar. Keseriusan penancangan program ini bahkan tertuang dalam Ketetapan MPR No. 11/MPR/1983, yang menyatakan bahwa bahasa harus dibina, dikembangkan, dan digunakan secara baik dan benar. Realisasinya, kon-sep adanya bahasa yang baik dan benar ini jelas-jelas merupakan bentuk pemaksaan atas penggunaan ragam tertentu yang merupakan bahasa hasil rekayasa ahli bahasa yang pro pemerintah ketika itu. Ada pandangan kritis yang dilontarkan Heryanto menanggapi realitas tersebut. Lewat tulisannya dalam majalah Prisma edisi khusus tentang bahasa, dia menyatakan:

Bahasa ini bukan berkembang dari suatu dinamika yang terjadi di masyarakat, tetapi merupakan hasil rekayasa profesional dan dirancang untuk pemasaran besar-besaran (*mass-marketing*)... Sebagai sebuah komoditas, tidaklah mengejutkan bahwa nilai bahasa ini diilhami oleh jargon ekonomi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan sebuah komoditas yang langka. Pengembangan dan promosi bahasa ini, menurut direktur utama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, membutuhkan tenaga, pikiran, dan biaya (Heryanto, 1989:3-16) .

Kondisi ideal yang ingin dicapai berkaitan dengan proyek ambisius pem-berlakuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, adalah sosialisasinya di masyarakat untuk fungsi komunikasi pada kondisi-kondisi formal. Namun karena kendala sistem aturan-aturannya yang rumit, tidak alamiah, dan penuh rekayasa, bahasa Indonesia yang baik dan benar telah gagal dalam menjalankan fungsinya. Dalam praktik berbahasa hampir tidak ada seorang pun yang bisa menerapkan kaidah-kaidahnya dengan benar dan rapi. Akhirnya, bahasa Indonesia Baku hanya hidup di dunia *langue* sebagai sistem bahasa yang disepakati oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tanpa pernah muncul sebagai *parole* yang benar-benar identik dengan *languenya*. Lebih lanjut, anjuran pemyasyarakatan bahasa Indonesia yang Baik dan Benar ternyata juga kerap menimbulkan ironi menggelikan. Di satu sisi pemerintah yang membuat sistemnya dan kemudian menganjurkan pemakaiannya, di sisi lain justru banyak pejabat penting pemerintah yang tampil dengan format bahasa yang tidak baik jika diukur dari standar bahasa Indonesia baku. Apa yang ditunjukkan Presiden Soeharto saat masih menjabat presiden lewat ungkapan: semangkin, dari pada yang tidak pada tempatnya, dan ken-nya, dalam berbagai forum resmi, merupakan ironi menggelikan.

Selain itu, bentuk reproduksi jargon dan wacana merupakan salah satu gejala luar biasa. Praktik ini mungkin dapat disejajarkan dengan bahasanya Foucault, yaitu dengan istilah praktik-praktik diskursif bahasa. Jargon-jargon dan istilah yang telah dikemas maknanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah, sengaja diciptakan dan dipropagandakan kepada masyarakat luas. Masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia jargon-jargon dan wacana seperti: tata niaga, normalisasi, swasembada, stabilitas nasional, pembangunan, *anti*-pembangun-an, tinggal landas, subversi, stabilitas keamanan, dan lain-lain. Walaupun se-ringkali realitas yang diacu jargon-jargon dan wacana tersebut bertolak belakang dengan makna yang dipropagandakan. Dengan meluncurkan istilah penataan kelembagaan seperti dalam kasus tata niaga cengkeh atau jeruk realitasnya justru malah semrawut, eksploitatif, serta memporak-porandakan sistem pasar cengkeh yang sebelumnya relatif stabil. Istilah normalisasi kampus juga tidak membuat kehidupan akademik bergerak ke arah yang lebih baik. Justru sebaliknya kebebasan mahasiswa menjadi semakin terkungkung, wacana ilmiah merosot, sikap kritis luluh, kemampuan berorganisasi berkurang.

Gejala lain yang timbul dalam bahasa Indonesia juga erat kaitannya dengan adanya eufimisme dan sarkasme berlebihan yang dipraktikkan pemerintah Orde Baru. Pada praktik eufimisme, pemerintah mensosialisasikan berbagai konsep dan wacana yang diperhalus, menentramkan, dan sekaligus menghibur atas berbagai realitas, aktifitas, dan tindakan tertentu terhadap masyarakat. Berbagai istilah dan terminologi yang terkait dengan program pemerintah banyak diciptakan. Misalnya; stabilitas nasional, kebijakan, keluarga kurang mampu, keluarga berencana, pusat penerangan masyarakat, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Sedangkan pada contoh eufimisme tindakan, misal realitasnya penangkapan, penculikan, pembunuhan terhadap mahasiswa, namun istilah yang dipakai pemerintah adalah mengamankan, menertibkan, atau menjaga stabilitas nasional.

Ironisnya, pemerintah tidak melakukan praktik eufimisme yang sama terhadap hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan yang mendukung program politiknya. Sebaliknya pemerintah justru mempraktikkan sarkasme terhadap berbagai realitas maupun aktifitas-aktifitas yang bersifat ko-nta produktif dan kritis. Seringkali orang atau masyarakat yang ingin mengkoreksi tindakan pemerintah karena sewenang-wenang, mereka malah dicap subversif atau makar. Selanjutnya imbas dari pemberian cap subversif dan makar tersebut secara psikologis maupun politis dapat membatasi ruang gerak yang bersangkutan dalam beraktifitas. Dinamainya gerakan masyarakat di Aceh (GAM: Gerakan Aceh Merdeka) dengan sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), juga merupakan strategi sarkasme yang diterapkan pemerintah terkait dengan tujuan politis tertentu. Penamaan GAM menjadi GPK disadari akan mampu memben-tuk opini publik untuk bersikap anti terhadap kelompok bersangkutan. Jika dikemudian hari ada usaha pembunuhan terhadap kelompok tersebut tentu publik akan mensejajarkannya dengan tindakan penumpasan terhadap para perusuh, pengacau, dan penjahat.

Namun seiring dengan sikap kritis masyarakat dan mulai terbongkarnya sandiwara wacana yang dipraktikkan pemerintah pada akhirnya memunculkan sikap dan tindakan resistensi. Sikap apatis bahkan anti terhadap produk kebijakan pemerintah menjadi marak. Bahasa Indonesia yang sudah terlanjur dilabelisasi sebagai bahasa resmi pemerintah pun terkena imbasnya. Wacana berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga mulai dicurigai sebagai tindakan yang tidak mengaspirasikan kehendak masyarakat madani. Akhirnya, lunturnya sikap positif *civil society* terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus dipahami sebagai persoalan krisis kepercayaan yang bermula dari lunturnya kepercayaan terhadap rezim Orde Baru sebagai pencipta ragam bahasa itu. Seperti diketahui bahwa selama masa berkuasanya Orde Baru, penguasa sistem negara telah membangun hegemoni guna mempertahankan kekuasaannya. Dengan dalih stabilitas nasional, ketertiban, dan keamanan nasional, masyarakat madani dipaksa

berfikir dan bertindak untuk mendukung ideologi maupun program yang dilaksanakan pemerintah.

Kesimpulan

Akhirnya sebagai penutup, penulis ingin menyitir pendapat Sapir & Whorf (1958) yang menyatakan, bahwa bahasa bukan hanya merupakan alat reproduksi untuk menyuarakan kembali gagasan-gagasan, namun justru bahasa itu sendiri yang menjadi pembuat gagasan. Dalam hal ini ada fungsi penting bahasa yang harus disadari, yaitu sebagai alat atau sarana untuk melakukan penkondisian atau kontrol tertentu atas sebuah ideologi maupun keadaan yang diinginkan. Teori tersebut tampaknya disadari benar oleh pemerintahan Orba, sehingga mereka memiliki kebijakan khusus mengenai arah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selain berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam rangka kehidupan bernegara, pada akhirnya juga difungsikan sebagai wahana efektif dalam mengarahkan wacana-wacana tertentu sebagaimana yang dikehendaki pihak pemerintah.

Sebagai penguasa, mengkonstruksi dan merekonstruksi wacana bukanlah hal yang sulit. Sebaliknya, menurut Michel Foucault praktik-praktik diskursif seperti itu justru layaknya sebuah hukum alam. Sudah se-wajarnya jika terjadi manipulasi wacana tertentu yang dilakukan oleh *man of desire* sebagai pihak yang berkuasa, atas unsur-unsur yang dikuasainya. Subjektivitas sering kali terjadi dalam setiap sendi-sendi kehidupan sosial sebagai wujud dari berlakunya hukum superior-inferior. Potensi praktik-praktik diskursif seperti yang diilustrasikan Foucault ini ternyata juga sangat gencar dipraktikkan oleh pemerintah Orba lewat pengendalian wacana bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Rupanya prinsip teori Foucault *The Theory of truth* disadari betul oleh para penguasa. Kebenaran pada dasarnya dapat dibentuk dan dikondisikan. Siapa pun yang memiliki posisi sebagai *man of desire*, mereka berpotensi dapat menciptakan dan mengkonstruksi kebenaran sesuai yang dikehendaki. Sebagai penguasa multi sektor, politik, ekonomi, budaya, bahkan media, mempublikasikan sebuah propaganda tentunya bukanlah hal yang sulit. Termasuk dalam hal ini pemutarbalikan fakta dapat dilakukan melalui publikasi besar-besaran atas multi sektor yang dikuasainya.

Namun arogansi yang kerap ditunjukkan pemerintah dalam menghegemoni rakyat guna mengkondisikan ideologi dan kondisi tertentu, pada akhirnya menciptakan bentuk resistensi tertentu. Resistensi tersebut biasanya merupakan wujud perlawanan terhadap ketidakpuasan yang dialami. Rakyat mulai menyadari bahwa fakta yang ada bukanlah seperti kondisi yang sedang dipublikasikan pemerintah. Akhirnya, produk-produk kebijakan pemerintah beserta simbol-simbol yang mewakili kekuasaan akan dijauhi.

Sebagai salah satu produk kebijakan pemerintah bahasa Indonesia yang baik dan benar pun bukannya diterima dengan penuh semangat, namun justru dilawan dengan berbagai bentuk tantangan yang berkembang di masyarakat. Di bidang bahasa sendiri sempat memunculkan fenomena slang, plesetan, maupun bahasa Jayus, sebagai ekspresi menentang sistem bahasa yang mapan.

Daftar Pustaka

- Adiwasono, Suprpto Riga, "Perubahan Sosial dan Perkembangan Bahasa," *Prisma* No.43, 1, 1989:12-21.
- Anonim, *Amanat Kenegaraan* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985).
- Beilharz, Peter, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers* (Sydney: Allen & Unwin Pty Ltd, 1991).

- Cassirer, Erns, *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia* (Jakarta: Gramedia, 1987).
- Foucault, Michel, *The Archeology of Knowledge & The Discourse on Language* (New York: Pantheon, 1972).
- Gordon, Colin, *Power Knowledge* (New York: Pantheon, 1980).
- Heryanto, Ariel, "Berjangkitnya Bahasa -Bahasa di Indonesia," *Prisma* No. 43,1, 1989:22-35.
- Sapir, Edward & Benjamin Lee Whorf, *Science and Linguistics* (New York: Routledge, 1958).